

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2020**

Balai Besar PPMBTPH
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar PPMBTPH adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar PPMBTPH mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar PPMBTPH. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Depok, 30 Desember 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,



Ir. Warjito, M.Si
NIP. 196307121989031017

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

B.5.3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

B.5.4. Belanja Modal Lainnya

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Aset Lainnya

C.3.1. Aset Tak Berwujud

C.3.2. Aset Lain-lain

C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

C.5. Ekuitas

C.5.1. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

D.4. Beban Barang dan Jasa

D.5. Beban Pemeliharaan

D.6. Beban Perjalanan Dinas

- D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi
- D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap
 - E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
 - E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
 - E.5. Ekuitas Akhir



KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH

TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Jalan Raya Tapos, Kotak pos 20 Tapos-Depok (16457)

Telepon/Faksimile : (021) 8755046

Website : bbppmbtph.tanamanpangan.deptan.go.id

E-mail : bbppmb_tph@yahoo.co.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Besar PPMBTPH yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Depok, 30 Desember 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,

Ir. Warjito, M.Si
NIP. 196307121989031017

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Besar PPMBTPH Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 123.301.948,00 atau mencapai 101,48% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 121.500.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp. 15.657.834.703,00 atau mencapai 99,10% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 15.800.000.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020.

Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 54.999.034.615,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 869.500,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 54.834.887.323,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp. 0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 163.277.792,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 54.999.034.615,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 123.301.948,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 15.596.373.970,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp. -15.473.072.022,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp. 2.389.830,00 dan Defisit Rp. 0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. -15.470.682.192,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp. 54.392.590.052,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp. -15.470.682.192,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai

Rp. 0,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 16.077.126.755,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp. 54.999.034.615,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI BESAR PPMBTPH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019**

Uraian	Catatan	31 Desember 2020			31 Desember 2019
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	121.500.000,00	123.301.948,00	101,48	192.523.836,00
Jumlah Pendapatan		121.500.000,00	123.301.948,00	101,48	192.523.836,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	3.899.175.000,00	3.787.412.489,00	97,13	3.771.178.050,00
Belanja Barang	B.4.	10.588.075.000,00	10.563.990.614,00	99,77	8.337.489.980,00
Belanja Modal	B.5.	1.312.750.000,00	1.306.431.600,00	99,52	2.557.649.610,00
Jumlah Belanja		15.800.000.000,00	15.657.834.703,00	99,10	14.666.317.640,00

II. NERACA

BALAI BESAR PPMBTPH
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET			
Aset Lancar			
Persediaan	C.1.1.	869.500,00	1.100.000,00
Jumlah Aset Lancar		869.500,00	1.100.000,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	45.478.854.000,00	45.478.854.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	16.338.481.676,00	15.760.611.831,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	5.765.602.225,00	5.353.110.225,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	1.040.389.400,00	1.040.389.400,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	18.759.500,00	18.759.500,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	-13.807.199.478,00	-13.341.766.529,00
Jumlah Aset Tetap		54.834.887.323,00	54.309.958.427,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.3.1.	215.119.000,00	93.179.000,00
Aset Lain-lain	C.3.2.	732.505.755,00	0,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3.	-784.346.963,00	-11.647.375,00
Jumlah Aset Lainnya		163.277.792,00	81.531.625,00
Jumlah Aset		54.999.034.615,00	54.392.590.052,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban		0,00	0,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.	54.999.034.615,00	54.392.590.052,00
Jumlah Ekuitas		54.999.034.615,00	54.392.590.052,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		54.999.034.615,00	54.392.590.052,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI BESAR PPMBTPH
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019**

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	123.301.948,00	131.731.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		123.301.948,00	131.731.000,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	3.787.412.489,00	3.771.178.050,00
Beban Persediaan	D.3.	813.152.224,00	384.002.234,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	4.558.362.498,00	3.001.804.226,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	696.610.556,00	824.281.396,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	4.498.485.666,00	4.128.491.934,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	1.242.350.537,00	1.117.228.147,00
JUMLAH BEBAN		15.596.373.970,00	13.226.985.987,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-15.473.072.022,00	-13.095.254.987,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.8.	0,00	42.400.000,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.8.	0,00	12.565.835,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8.	8.247.030,00	21.679.771,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8.	5.857.200,00	1.753.125,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		2.389.830,00	49.760.811,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-15.470.682.192,00	-13.045.494.176,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI BESAR PPMBTPH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019**

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
EKUITAS AWAL	E.1.	54.392.590.052,00	47.695.481.395,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-15.470.682.192,00	-13.045.494.176,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	0,00	5.154.309.029,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.1.	0,00	5.271.858.000,00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.2.	0,00	-117.548.971,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	16.077.126.755,00	14.588.293.804,00
EKUITAS AKHIR	E.5.	54.999.034.615,00	54.392.590.052,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar PPMBTPH

Balai Besar PPMBTPH didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan. Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura didirikan sebagai salah satu upaya Kementerian Pertanian untuk melaksanakan pengembangan serta pemberian bimbingan teknis Pengujian Mutu Benih dan penerapan sistem manajemen mutu tanaman pangan dan hortikultura. Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura bertujuan untuk mengembangkan metode pengujian dan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian benih untuk mendukung ketersediaan benih tanaman pangan yang bersertifikat baik dari varietas unggul maupun varietas lokal. Melalui peranan Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura diharapkan berkembangnya metode pengujian laboratorium, sertifikasi dan pengawasan peredaran benih penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian benih dan pelaksanaan uji profisiensi / banding.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura berkomitmen dengan visi terwujudnya lembaga pengembangan pengujian mutu benih bertaraf internasional untuk mendukung sistem perbenihan tanaman pangan dan hortikultura yang tangguh dan berdaya saing

Untuk mewujudkan visi tersebut Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi kelembagaan Balai Besar PPMBTPH
2. Mewujudkan standarisasi laboratorium penguji benih
3. Menerapkan sertifikasi terhadap pelaku usaha dan produk perbenihan
4. Meningkatkan pelayanan dan informasi dalam pengembangan pengujian mutu benih.

Dalam tataran praktisnya, Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura membuat rencana strategis kegiatan yang diyakini mampu mendorong terciptanya visi dan misi dalam rangka menunjang tujuan pembangunan pertanian. Kegiatan-kegiatan strategis tersebut meliputi :

1. Melakukan pengembangan teknik dan metode pengujian laboratorium, sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura untuk melayani pengguna/stake holder;
2. Peningkatan dan perluasan jaringan kerjasama dengan lembaga benih/instansi dan stake holder dalam pengembangan mutu benih;
3. Peningkatan pelayanan jasa pengujian mutu benih;
4. Peningkatan pengendalian mutu benih yang beredar dipasaran melalui pemberian sertifikasi dan pengujian mutu benih;

5. Peningkatan kualitas hasil pengujian mutu benih melalui pelaksanaan uji profisiensi;
6. Peningkatan penerapan sistem manajemen mutu melalui pemberian bimbingan;.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar PPMBTPH. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Besar PPMBTPH menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar PPMBTPH dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Besar PPMBTPH yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar PPMBTPH adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) **Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) **Aset**

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Besar PPMBTPH telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	121.500.000,00	121.500.000,00
Jumlah Pendapatan	121.500.000,00	121.500.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.082.314.000,00	3.773.764.000,00
Belanja Lembur	80.411.000,00	125.411.000,00
Belanja Barang Operasional	1.377.426.000,00	1.606.286.000,00
Belanja Barang Non Operasional	804.213.000,00	1.020.505.000,00
Belanja Barang Persediaan	907.087.000,00	891.807.000,00
Belanja Jasa	1.599.040.000,00	1.933.957.500,00
Belanja Pemeliharaan	597.412.000,00	628.812.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	4.014.347.000,00	4.506.707.500,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	424.341.000,00	774.341.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	413.409.000,00	413.409.000,00
Belanja Modal Lainnya	0,00	125.000.000,00
Jumlah Belanja	14.300.000.000,00	15.800.000.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 123.301.948,00 atau mencapai 101,48% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 121.500.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Pendapatan			
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	121.500.000,00	123.181.000,00	101,38

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Denda	0,00	120.948,00	0,00
Jumlah	121.500.000,00	123.301.948,00	101,48

Realisasi Pendapatan TA 2020 mengalami penurunan sebesar -35,96 % dibandingkan TA 2019. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Besar PPMBTPH adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	.%
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	123.181.000,00	130.283.000,00	-5,45
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0,00	42.400.000,00	-100,00
Pendapatan Denda	120.948,00	0,00	0,00
Pendapatan Lain-lain	0,00	18.392.836,00	-100,00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	0,00	1.448.000,00	-100,00
Jumlah	123.301.948,00	192.523.836,00	-35,96

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2020 adalah sebesar Rp. 15.657.834.703,00 atau 99,10% dari anggaran belanja sebesar Rp. 15.800.000.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2020

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai	3.899.175.000,00	3.787.412.549,00	97,13
Belanja Barang	10.588.075.000,00	10.563.990.614,00	99,77
Belanja Modal	1.312.750.000,00	1.306.431.600,00	99,52
Total Belanja Kotor	15.800.000.000,00	15.657.834.763,00	99,10

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Pengembalian Belanja		-60,00	0,00
Total Belanja	15.800.000.000,00	15.657.834.703,00	99,10

Dibandingkan dengan Tahun 2019, Realisasi Belanja TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 6,76 % dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain oleh Kenaikan Anggaran

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	.%
Belanja Pegawai	3.787.412.489,00	3.771.178.050,00	0,43
Belanja Barang	10.563.990.614,00	8.337.489.980,00	26,70
Belanja Modal	1.306.431.600,00	2.557.649.610,00	-48,92
Total Belanja	15.657.834.703,00	14.666.317.640,00	6,76

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.787.412.489,00 dan Rp. 3.771.178.050,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,43% dari TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh Bertambahnya Pegawai yang mengalami kenaikan pangkat dan golongan

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.663.019.549,00	3.715.832.267,00	-1,42
Belanja Lembur	124.393.000,00	55.349.000,00	124,74
Jumlah Belanja Kotor	3.787.412.549,00	3.771.181.267,00	0,43
Pengembalian Belanja Pegawai	- 60,00	- 3.217,00	- 98,13

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Jumlah Belanja	3.787.412.489,00	3.771.178.050,00	0,43

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.10.563.990.614,00 dan Rp. 8.337.489.980,00. Realisasi belanja barang TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 26,70% dari TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh Kenaikan Anggaran

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1.606.090.152,00	1.093.522.080,00	46,87
Belanja Barang Non Operasional	1.019.011.646,00	685.359.940,00	48,68
Belanja Barang Persediaan	882.252.444,00	528.633.124,00	66,89
Belanja Jasa	1.933.260.700,00	1.222.922.206,00	58,09
Belanja Pemeliharaan	624.890.006,00	678.560.696,00	-7,91
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	4.498.485.666,00	4.128.491.934,00	8,96
Jumlah Belanja Kotor	10.563.990.614,00	8.337.489.980,00	26,70
Pengembalian Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	10.563.990.614,00	8.337.489.980,00	26,70

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.306.431.600,00 dan Rp. 2.557.649.610,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2020 mengalami penurunan sebesar - 48,92% dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh Penurunan Anggaran

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	771.999.600,00	1.721.468.610,00	- 55,15
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	412.492.000,00	708.891.000,00	- 41,81

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	34.111.000,00	- 100,00
Belanja Modal Lainnya	121.940.000,00	93.179.000,00	30,87
Jumlah Belanja Kotor	1.306.431.600,00	2.557.649.610,00	- 48,92
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	1.306.431.600,00	2.557.649.610,00	- 48,92

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 771.999.600,00 dan Rp. 1.721.468.610,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 mengalami penurunan sebesar -55,15% dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh Penurunan Anggaran

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	771.999.600,00	1.721.468.610,00	- 55,15
Jumlah Belanja Kotor	771.999.600,00	1.721.468.610,00	- 55,15
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	771.999.600,00	1.721.468.610,00	- 55,15

B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 412.492.000,00 dan Rp. 708.891.000,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2020 mengalami penurunan sebesar - 41,81% dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh Penurunan Anggaran

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	412.492.000,00	708.891.000,00	- 41,81
Jumlah Belanja Kotor	412.492.000,00	708.891.000,00	- 41,81
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	412.492.000,00	708.891.000,00	- 41,81

B.5.4. BELANJA MODAL LAINNYA

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 121.940.000,00 dan Rp. 93.179.000,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 30,87% dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh Kenaikan Anggaran

Perbandingan Belanja Modal Lainnya
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	121.940.000,00	93.179.000,00	30,87
Jumlah Belanja Kotor	121.940.000,00	93.179.000,00	30,87
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	121.940.000,00	93.179.000,00	30,87

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 869.500,00 dan Rp. 1.100.000,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Barang Konsumsi	869.500,00	1.100.000,00
Jumlah	869.500,00	1.100.000,00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Besar PPMBTPH per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 45.478.854.000,00 dan Rp. 45.478.854.000,00.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Besar PPMBTPH per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 16.338.481.676,00 dan Rp. 15.760.611.831,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	15.760.611.831,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	745.688.100,00
Transfer Masuk	554.530.000,00
Pengembangan Nilai Aset	26.311.500,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-732.505.755,00
Saldo per 31 Desember 2020	16.338.481.676,00

Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	- 13.019.283.855,00
Nilai Buku per 31 Desember 2020	3.319.197.821,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa :

1. Pembelian 1 Buah Camera Digital senilai Rp. 5.544.000 (Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah),
2. Pembelian 1 Buah Rak Piring Alumunium senilai Rp. 3.668.500 (Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah),
3. Pembelian 1 Buah Drone senilai Rp. 33.638.000 (Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).
4. Pembelian 1 Buah Scanner senilai Rp.6.529.600 (Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah).
5. Pembelian 2 Buah A.C Split 2 PK senilai Rp.17.596.150 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).
6. Pembelian 2 Buah A.C Split ½ PK senilai Rp.10.587.750 (Sepuluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
7. Pembelian 1 Buah Meja Kerja senilai Rp.16.720.000 (Enam Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
8. Pembelian 1 Buah Meubelair (1 Set Pintu Kabinet Kayu) senilai Rp.11.965.250 (Sebelas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
9. Pembelian 1 Buah Meubelair (1 Set Pintu dan Laci Kabinet) senilai Rp.15.727.250 (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
10. Pembelian 1 Buah Meubelair (1 Set Pintu Kabinet Kayu) senilai Rp.4.389.000 (Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
11. Pembelian 1 Buah Meubelair (1 Set Soga dan Meja) senilai Rp.20.900.000 (Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
12. Pembelian 1 Buah Lemari Penyimpan (Lemari Gantung) senilai Rp.3.135.000 (Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
13. Pembelian 1 Buah Lemari Penyimpan (Lemari Lab. Cendawan) senilai Rp.16.720.000 (Enam Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
14. Pembelian 2 Buah Meja Kerja Kayu senilai Rp.10.450.000 (Sepuluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
15. Pengembangan Aset 3 Buah Meja Kerja Laboratorium senilai Rp.26.311.500 (Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Rupiah).
16. Pembelian 5 Buah Dispenser senilai Rp. 17.150.000 (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
17. Pembelian 1 Buah Charging Hub Battery Drone senilai Rp. 2.294.000 (Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).
18. Pembelian 3 Buah Printer senilai Rp. 14.370.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
19. Pembelian 1 Buah Alat Studio Lainnya (Speaker Portable) senilai Rp. 1.596.000 (Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).

20. Pembelian 3 Buah Baterai Drone senilai Rp. 10.584.000 (Sepuluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).
21. Pembelian 1 Buah Kendaraan Roda-2 (Sepeda Motor) senilai Rp. 27.100.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah).
22. Pembelian 3 Buah A.C Split senilai Rp. 17.435.000 (Tujuh Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
23. Pembelian 1 Buah Drone senilai Rp. 147.675.000 (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
24. Pembelian 1 Buah Camera Digital senilai Rp. 11.825.000 (Sebelas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
25. Pembelian 1 Buah Handphone senilai Rp. 8.096.000 (Delapan Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).
26. Pembelian 2 Buah Laptop senilai Rp. 50.105.000 (Lima Puluh Juta Seratus Lima Ribu Rupiah).
27. Pembelian 2 Unit P.C senilai Rp. 25.520.000 (Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
28. Pembelian 1 Buah Mikroskop Stereo senilai Rp. 86.488.000 (Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
29. Pembelian 1 Buah Refrigerator senilai Rp. 53.200.000 (Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
30. Pembelian 1 Buah Timbangan Analitik senilai Rp. 45.625.000 (Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
31. Pembelian 1 Buah Mikroskop Binokuler senilai Rp. 42.525.000 (Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
32. Pembelian 1 Buah Software Komputer senilai Rp. 63.750.000 (Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
33. Transfer masuk 2 Buah Televisi untuk mesin Absensi dan AWR senilai Rp. 27.950.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
34. Transfer masuk 1 Buah Camera Conference (Web Camera) senilai Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
35. Transfer masuk 1 Buah Alat Komunikasi lainnya (Handphone AWR) senilai Rp. 5.230.000 (Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
36. Transfer masuk 2 Buah Mesin Absensi senilai Rp. 15.850.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
37. Transfer masuk 1 Unit Kendaraan Roda-4 senilai Rp. 502.000.000 (Lima Ratus Dua Juta Rupiah).
38. Pengembangan Nilai Aset Meja dan Lemari Laboratorium Fisika senilai Rp. 26.311.500 (Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Rupiah).

Mutasi kurang atas nilai Peralatan dan Mesin senilai Rp752.984.155 (Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Lima Rupiah), berasal dari:

1. Penghentian BMN dari Penggunaan yaitu 1 Buah Baggage Trolley Senilai Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
2. Penghentian BMN dari Penggunaan yaitu 1 Buah Lemari Penyimpan Senilai Rp. 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

3. Penghentian BMN dari Penggunaan yaitu 2 Buah Mesin Ketik Senilai Rp. 4.840.000 (Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
4. Penghentian BMN dari Penggunaan yaitu 1 Buah Mesin Ketik Elektronik Senilai Rp. 7.810.000 (Tujuh Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
5. Penghentian BMN dari Penggunaan yaitu 1 Buah Kardex Besi senilai Rp. 109.000 (Seratus Sembilan Ribu Rupiah).
6. Penghentian BMN dari Penggunaan yaitu 1 Buah Buffet Senilai Rp. 220.000 (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
7. Penghentian BMN dari Penggunaan yaitu 1 Buah Mesin Absensi Senilai Rp. 29.975.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
8. Penghentian BMN dari Penggunaan yaitu 6 Buah Meja Kerja Kayu Senilai Rp. 3.189.000 (Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
9. Penghentian BMN dari Penggunaan yaitu 29 Buah Kursi Besi/Metal Senilai Rp. 15.834.160 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah).
10. Penghentian BMN dari Penggunaan yaitu 1 Buah Meja Resepsionis Senilai Rp. 2.480.000 (Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
11. Penghentian BMN dari Penggunaan yaitu 1 Buah Mesin Penghisap Debu Senilai Rp. 1.950.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
12. Penghentian BMN dari Penggunaan yaitu 8 Buah A.C Split Senilai Rp. 26.032.000 (Dua Puluh Enam Juta Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).
13. Penghentian BMN dari Penggunaan yaitu 2 Buah Exhaust Fan Senilai Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
14. Penghentian BMN dari Penggunaan yaitu 1 Buah Kompor Gas Senilai Rp. 850.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
15. Penghentian BMN dari Penggunaan yaitu 1 Buah Stabilisator Senilai Rp. 125.000 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
16. Penghentian BMN dari Penggunaan yaitu 2 Buah Tangga Aluminium Senilai Rp. 1.194.000 (Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).
17. Penghentian BMN dari Penggunaan yaitu 1 Buah Dispenser Senilai Rp. 486.000 (Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).
18. Penghentian BMN dari Penggunaan yaitu 6 Buah Uninterruptible Power Supply Senilai Rp. 7.491.000 (Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).
19. Penghentian BMN dari Penggunaan yaitu 1 Buah Scanner Facsimile Senilai Rp. 1.890.000 (Satu Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
20. Penghentian BMN dari Penggunaan yaitu 4 Buah Meja Kerja Laboratorium Senilai Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah).
21. Penghentian BMN dari Penggunaan yaitu 1 Buah P.C Unit Senilai Rp. 8.396.020 (Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Puluh Rupiah).
22. Penghentian BMN dari Penggunaan yaitu 4 Buah Laptop Senilai Rp. 54.766.575 (Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
23. Penghentian BMN dari Penggunaan yaitu 4 Buah Printer Senilai Rp. 12.532.500 (Dua Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

24. Penghentian BMN dari Penggunaan yaitu 3 Buah Bin (tempat sampah) Senilai Rp.2.699.400 (Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah).
25. Penghapusan dokumen TAYL BMN yaitu 1 Buah Sepeda Motor Senilai Rp. 16.154.000 (Enam Belas Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah).
26. Pengusulan Penghapusan BMN ke Pengelola BMN yaitu 2 Buah Kendaraan Roda-4 Senilai Rp. 306.117.000 (Tiga Ratus Enam Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah).
27. Pengusulan Penghapusan BMN ke Pengelola BMN yaitu 17 Buah Kendaraan Roda-2 Senilai Rp. 244.463.500 (Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah).

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Besar PPMBTPH per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.765.602.225,00 dan Rp. 5.353.110.225,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	5.353.110.225,00
Mutasi Tambah	
Pengembangan Melalui KDP	412.492.000,00
Saldo per 31 Desember 2020	5.765.602.225,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	-411.311.350,00
Nilai Buku per 31 Desember 2020	5.354.290.875,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa :

1. Pengembangan melalui KDP atas Bangunan Kantor Permanen dengan NUP 1 senilai Rp. 85.166.200 (Delapan Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah),
2. Pengembangan melalui KDP atas Bangunan Kantor Permanen dengan NUP 2 senilai Rp. 130.358.800 (Seratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah),
3. Pengembangan melalui KDP atas Bangunan Laboratorium Permanen dengan NUP 1 senilai Rp.51.067.000 (Lima Puluh Satu Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
4. Pengembangan melalui KDP atas Bangunan Gedung Kantor Lainnya dengan NUP 1 senilai Rp. 145.900.000 (Seratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Rupiah),

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Besar PPMBTPH per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.040.389.400,00 dan Rp. 1.040.389.400,00.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Besar PPMBTPH per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 18.759.500,00 dan Rp. 18.759.500,00.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Besar PPMBTPH per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. -13.807.199.478,00 dan Rp. -13.341.766.529,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	16.338.481.676,00	-13.019.283.855,00	3.319.197.821,00
2.	Gedung dan Bangunan	5.765.602.225,00	-411.311.350,00	5.354.290.875,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.040.389.400,00	-376.604.273,00	663.785.127,00
4.	Aset Tetap Lainnya	18.759.500,00	0,00	18.759.500,00
Akumulasi Penyusutan		23.163.232.801,00	-13.807.199.478,00	9.356.033.323,00

C.3. ASET LAINNYA

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 215.119.000,00 dan Rp. 93.179.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi nilai Aset Tak Berwujud tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Perbandingan Aset Tak Berwujud
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	93.179.000,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	63.750.000,00
Pengembangan Nilai Aset	58.190.000,00
Saldo per 31 Desember 2020	215.119.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	-52.609.208,00
Nilai Buku per 31 Desember 2020	162.509.792,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Tak Berwujud adalah berupa:

1. Pembuatan Aplikasi e-doksitu senilai Rp. 63.750.000,-
2. Pengembangan Aplikasi Sempel senilai Rp. 58.190.000,-

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Uraian	Nilai
Software	215.119.000,00
Jumlah	215.119.000,00

C.3.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Besar PPMBTPH per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 732.505.755,00 dan Rp. 0,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Besar PPMBTPH serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	0,00
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	732.505.755,00
Saldo per 31 Desember 2020	732.505.755,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	-731.737.755,00
Nilai Buku per 31 Desember 2020	768.000,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain adalah berupa:

1. Penghentian Penggunaan Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 senilai Rp. 550.580.500,-
2. Penghentian Peralatan Mesin dan Kantor Senilai Rp. 181.925.255,-

C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Besar PPMBTPH per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. -784.346.963,00 dan Rp. -11.647.375,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	215.119.000,00	-52.609.208,00	162.509.792,00
2.	Aset Lain-lain	732.505.755,00	-731.737.755,00	768.000,00
Akumulasi Penyusutan		947.624.755,00	-784.346.963,00	163.277.792,00

C.5. EKUITAS

C.5. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 54.999.034.615,00 dan Rp. 54.392.590.052,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 123.301.948,00 dan Rp. 131.731.000,00. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	120.948,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	0,00	1.448.000,00	-100,00
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	123.181.000,00	130.283.000,00	-5,45
Jumlah	123.301.948,00	131.731.000,00	-6,40

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.787.412.489,00 dan Rp. 3.771.178.050,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	2.570.176.000,00	2.598.907.700,00	-1,11
Beban Pembulatan Gaji PNS	35.551,00	36.178,00	-1,73
Beban Tunj. Anak PNS	55.622.518,00	57.099.710,00	-2,59
Beban Tunj. Beras PNS	128.617.920,00	131.876.820,00	-2,47
Beban Tunj. Fungsional PNS	262.500.000,00	270.600.000,00	-2,99
Beban Tunj. PPh PNS	15.387.650,00	15.928.102,00	-3,39

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Tunj. Struktural PNS	91.565.000,00	90.050.000,00	1,68
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	190.300.850,00	189.502.540,00	0,42
Beban Tunjangan Umum PNS	47.355.000,00	45.660.000,00	3,71
Beban Uang Lembur	124.393.000,00	55.349.000,00	124,74
Beban Uang Makan PNS	301.459.000,00	316.168.000,00	-4,65
Jumlah	3.787.412.489,00	3.771.178.050,00	0,43

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 813.152.224,00 dan Rp. 384.002.234,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	529.495.295,00	169.144.115,00	213,04
Beban Persediaan konsumsi	274.576.929,00	213.108.119,00	28,84
Beban persediaan lainnya	9.080.000,00	1.750.000,00	418,86
Jumlah	813.152.224,00	384.002.234,00	111,76

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.558.362.498,00 dan Rp. 3.001.804.226,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Bahan	915.386.646,00	645.109.940,00	41,90
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	51.345.000,00	0,00	0,00
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	442.696.016,00	0,00	0,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	149.700.000,00	0,00	0,00
Beban Honor Output Kegiatan	52.280.000,00	40.250.000,00	29,89
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	262.772.000,00	0,00	0,00
Beban Jasa Lainnya	193.272.857,00	107.750.000,00	79,37
Beban Jasa Profesi	500.150.000,00	317.000.000,00	57,78
Beban Keperluan Perkantoran	964.604.411,00	1.037.712.420,00	-7,05
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	336.495.233,00	115.658.150,00	190,94
Beban Langganan Listrik	187.417.684,00	196.740.329,00	-4,74
Beban Langganan Telepon	141.585.036,00	142.154.977,00	-0,40
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	5.700.000,00	22.800.000,00	-75,00
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	43.389.725,00	33.009.660,00	31,45
Beban Sewa	311.567.890,00	343.618.750,00	-9,33
Jumlah	4.558.362.498,00	3.001.804.226,00	51,85

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 696.610.556,00 dan Rp. 824.281.396,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	333.645.950,00	368.305.138,00	-9,41
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	291.244.056,00	310.255.558,00	-6,13

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	5.163.050,00	9.182.000,00	-43,77
Beban Persediaan suku cadang	66.557.500,00	136.538.700,00	-51,25
Jumlah	696.610.556,00	824.281.396,00	-15,49

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.498.485.666,00 dan Rp. 4.128.491.934,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	3.265.829.042,00	3.069.990.618,00	6,38
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	169.650.000,00	0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	263.000.000,00	117.700.000,00	123,45
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.240.000,00	31.940.000,00	66,69
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	746.766.624,00	908.861.316,00	-17,83
Jumlah	4.498.485.666,00	4.128.491.934,00	8,96

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.242.350.537,00 dan Rp. 1.117.228.147,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Amortisasi Software	40.961.833,00	11.647.375,00	251,68
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	179.009.282,00	157.770.313,00	13,46
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	138.061.292,00	138.061.292,00	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	4.274.166,00	3.732.721,00	14,51
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	444.500,00	1.821.459,00	-75,60
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	879.599.464,00	804.194.987,00	9,38
Jumlah	1.242.350.537,00	1.117.228.147,00	11,20

D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00	-12.565.835,00	-100,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-5.857.200,00	-1.753.125,00	234,10
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	8.247.030,00	3.286.935,00	150,90
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	42.400.000,00	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	15.907.836,00	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	2.485.000,00	-100,00
Jumlah	2.389.830,00	49.760.811,00	-95,20

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 54.392.590.052,00 dan Rp. 47.695.481.395,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. -15.470.682.192,00 dan Rp.-13.045.494.176,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 5.154.309.029,00.

E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 5.271.858.000,00.

E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. -117.548.971,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 16.077.126.755,00 dan Rp. 14.588.293.804,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2020.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2020
Ditagihkan ke Entitas Lain	15.657.834.703,00
Diterima dari Entitas Lain	-123.301.948,00
Transfer Masuk	542.594.000,00
Jumlah	16.077.126.755,00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2020 saldo DDEL adalah sebesar Rp. -123.301.948,00 sedangkan DKEL sebesar Rp. 15.657.834.703,00.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 542.594.000,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2020.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Peralatan dan Mesin	018030199238251000KP	554.530.000,00
2.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	018030199238251000KP	-11.936.000,00
Jumlah			542.594.000,00

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 54.999.034.615,00 dan Rp. 54.392.590.052,00